



Perencanaan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong

Community Participation Planning in South Tomoli Village, Toribulu District, Parigi Moutong Regency

Fachrul Reza^{1*}, Syugiarto²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu, rezadakwah123@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu, ughenk007@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: rezadakwah123@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

Kata Kunci:

Perencanaan Partisipasi;
Partisipasi Politik;
Partisipasi Social;
Partisipasi Warga

Keywords:

Participatory Planning;
Political Participation;
Social Participation;
Citizen Participation.

DOI: 10.56338/jks.v7i12.6574

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: Menganalisis Perencanaan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini pada Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: 1) Mengklarifikasi data; 2) Mengelompokkan data; 3) Mengolah data; dan 4) Mendeskripsikan data secara keseluruhan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori Partisipasi oleh Slamet (2003:8), yaitu: Partisipasi Politik (*political participation*), Partisipasi Social (*social participation*), dan Partisipasi Warga (*citizen participation/citizenship*). penelitian yang penulis lakukan di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong melalui observasi, pengamatan secara langsung dan hasil wawancara langsung dengan beberapa informan, dilihat dari beberapa indikator, yaitu: dari ketiga dimensi/aspek Partisipasi Politik, Partisipasi Sosial dan Partisipasi Warga. Penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi politik sudah berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah Desa Tomoli Selatan dan warga masyarakat di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi Moutong pada umumnya, sedangkan indikator/dimensi partisipasi Sosial dan partisipasi warga yang hasilnya masih tidak terlaksana dengan baik. Faktor utama adalah sumber daya manusia (warga desa), dimana sebagian warga desa belum semuanya ikut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi program perencanaan pembangunan desa dan sebagian warga desa tidak peduli dengan apa yang telah pemerintah desa Tomoli selatan Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi moutong laksanakan.

ABSTRACT

This study aims to: Analyze Community Participation Planning in South Tomoli Village, Toribulu District, Parigi Moutong Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The location of this study is in South Tomoli Village, Toribulu District, Parigi Moutong Regency. Data collection techniques use interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out in stages: 1) Clarifying data; 2) Grouping data; 3) Processing data; and 4) Describing the data as a whole with the results of research that has been conducted by researchers using the Participation theory by Slamet (2003: 8), namely: Political Participation, Social Participation, and Citizen Participation (*citizen participation/citizenship*), the research that the author conducted in South Tomoli Village, Toribulu District, Parigi Moutong Regency through observation, direct observation and the results of direct interviews with several informants, seen from several indicators, namely: from the three dimensions/aspects of Political Participation, Social Participation and Citizen Participation. The author concludes that political participation has been running well according to the expectations of the South Tomoli Village government and the people of South Tomoli Village, Toribulu District, Parigi Moutong Regency in general, while the indicators/dimensions of social participation and citizen participation have not been implemented well. The main factor is human resources (villagers), where some villagers have not all participated in overseeing and supervising village development planning programs and some villagers do not care about what the South Tomoli Village government, Toribulu District, Parigi Moutong Regency has implemented.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas menuju keadaan yang lebih baik. Dengan mendayagunakan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan, sedangkan potensi manusia perlu ditingkatkan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pembangunan. Demikian halnya dengan pembangunan desa dan masyarakat pedesaan adalah suatu proses perubahan dan pembaharuan berlangsung di desa dan dalam berkehidupan masyarakat yang sedang berjalan, yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa agar dapat hidup secara layak dan sejahtera. Agar pembangunan berjalan sebagaimana yang kita harapkan, maka diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang samastrategi yang diterapkan adalah melalui strategi penyadaran.

Merencanakan suatu program bukan merupakan pekerjaan yang mudah, suatu program yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang di hadapi oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut, semakin beragam dan kompleks kebutuhan dan permasalahan dari kelompok sasaran, akan semakin rumit penyusunan perencanaan suatu program. Masyarakat (kelompok sasaran) mempunyai karakteristik tertentu. Masyarakat memiliki kebutuhan dan minat yang beragam, kemampuan mereka dalam menganalisis situasi yang dihadapi juga beragam, kemampuan mereka dalam mengambil keputusan juga tidak sama antar kelompok masyarakat satu dengan lainnya.

Sesuai dengan amanat yang diemban dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah melibatkan masyarakat luas. Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah. Dengan cara ini akan semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat harus mampu merumuskan sendiri atas permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang dihadapi yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan dan dilaksanakan.

Desa merupakan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa musyawarah perencanaan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. penatausahaan keuangan pemerintahan desa terpisah dari keuangan pemerintahan kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan, karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Perencanaan memiliki banyak makna yang sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Perencanaan adalah suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang di lakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu⁴. Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa perencanaan program itu harus sistematis, jelas dan terarah, dengan adanya suatu program yang jelas, seorang perencana akan dapat membedakan antara kebutuhan yang penting dan kebutuhan yang kurang penting. Suatu program yang baik tidak akan terjadi secara kebetulan, akan tetapi program yang di rencanakan dan di bangun dengan kerangka pemikiran yang matang. Kebutuhan akan adanya perencanaan ini penting karena beragamnya permasalahan yang dihadapi, perencanaan program dituntut untuk membuat suatu perencanaan yang jelas dan sisitematis, disamping itu perencanaan suatu program akan memberikan makna dan sisitem kerja tentang kegiatan yang akan di lakukan.

Program juga merupakan landasan bagi kegiatan yang akan dilakukan dikemudian hari. Program yang disusun secara matang akan merupakan arah dan pedoman bagi kegiatan yang akan dilakukan. Dengan perencanaan program, siapa saja yang berfungsi sebagai pelaksana akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lampaudan tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada tugas-tugas yang akan dilakukannya kemudian.

Pengembangan masyarakat melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakatdalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-peran kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Didalam sebuah program pembangunan desa, baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya, partisipasi masyarakat harus diikut sertakan dan dilibatkan didalamnya, demi kebutuhan bersama. Segi positif dalam perencanaan partisipasi masyarakat dapat mendorong munculnya keterlibatan emosional terhadap program-program yang telah direncanakan, sedangkan segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan yaitu: bagian terbesar dari suatu program telah selesai dikerjakan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan karena masyarakatlah sebagai pihak yang menerima dampak dan manfaat dari perencanaan pembangunan tersebut. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan dan pelaksana harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang. Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi taraf kondisi dan taraf hidup masyarakat desa.

Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Kesiadaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemauan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarkat di dalam pembagunan dapat membutuhka sebuah kemampuan masyarakat dalam sebuah pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, persepsi yag pundamental pembangunan masyrakat adalah peningkatan partisipasi demokrasi, dengan demikian, partisipasi tidak hanya ikut-ikutan tetapi, melainkan mengambil kepentingan masyarakat terutama pada masyarakat perdesaaan.

Berdasarkan hasil observasi, pengamatan langsung dan di perkuat dengan hasil penelitian di lapangan penulis menemukan adanya perencanaan pembangunan di Desa Tomoli Selatan yang Partisipasi Warga/Masyarakatnya Masih kurang andil atau ikut serta dalam penentuan keputusan keputusan penting untuk pembangunan desa tomoli selatan ini, hal ini saya lihat dengan di perkuat kasus yang menimpa desa ini pada tahun 2022 kemarin dimana terbukanya ruang pejabat desa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan dimana Ketika melihat dari teori yang peneliti gunakan dari segi indikator/dimensi partisipasi Sosial dan partisipasi warga yang hasilnya masih tidak terlaksana dengan baik. Faktor utama adalah sumber daya manusia (warga desa), dimana sebagian warga desa belum semuanya ikut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi program perencanaan pembangunan desa dan sebagian warga desa tidak peduli dengan apa yang telah pemerintah desa Tomoli selatan Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi moutong laksanakan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data bersifat triangulasi (gabungan) analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif (Sugiyono, 2006). Sedangkan deskriptif sendiri merupakan suatu cara pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar (Purba et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan Teknik purposive sebagai Langkah awal dalam menentukan informan penelitian, yang mana informan tersebut yaitu kepala desa tomoli selatan, sekretaris desa tomoli Selatan dan Masyarakat sebanyak 3 orang. Adapun Teknik analisis data yang digunakan ialah model interaktif dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33), bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus kajian penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan program Di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi Moutong, dalam pengukuran partisipasi masyarakat diperlukan beberapa indikator yang akan dijadikan acuan sebagai literature dalam penilaian partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dalam hal ini literatur yang digunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Slamet (2003:8) yaitu : Partisipasi politik (*political participation*), Partisipasi social (*social participation*), Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*). Ketiga poin tersebut akan dibahas satu persatu sebagai berikut:

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri. Pernyataan Kepala desa tomoli Selatan yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik Masyarakat dalam mendukung program Pembangunan desa telah berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, pernyataan Sekretaris desa tomoli Selatan yang mengungkapkan bahwa Tingkat kesadaran Masyarakat sangat baik dalam mendukung program Pembangunan desa.

Adanya partisipasi politik Masyarakat memberikan Gambaran bahwa program Pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tomoli Selatan diterima oleh Masyarakat, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Conyers (1994:154), bahwa salah satu alasan partisipasi Masyarakat sangat penting dikarenakan masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan

lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

Pernyataan dari ketiga Masyarakat juga memberikan Gambaran bahwa adanya partisipasi politik Masyarakat dari segi implementasi program Pembangunan desa. Hal ini memberikan Kesimpulan bahwa partisipasi Masyarakat desa Tomoli selatan dalam hal Partisipasi Politik sudah berjalan dengan baik, karena didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan program desa demi kemajuan pembangunan desa. Serta peran aparat desa yang dapat mempengaruhi warga masyarakatnya akan pentingnya partisipasi warga desa dalam hal perencanaan pembangunan. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Slamet (dalam Suryono 2001:124), bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

2. Partisipasi Sosial

Partisipasi social (*social participation*) partisipasi ditempatkan sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

Kepala desa dan sekretaris desa tomoli selatan mengemukakan bahwa Masyarakat memiliki kekurangan dari segi partisipasi sosial, yang disebabkan kurangnya pemahaman terkait program Pembangunan desa yang direncanakan oleh pemerintah desa tomoli Selatan. Ketiga Masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini mengakui bahwa kurangnya partisipasi Masyarakat disebabkan oleh Masyarakat itu sendiri. Kecenderungan ini bukan dilandasi ketidakpercayaan Masyarakat kepada pemerintah desa, tetapi lebih mengarah ke kesibukan pribadi sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berpartisipasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek partisipasi sosial tidak berjalan sesuai dengan harapan / tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari Masyarakat itu sendiri. Partisipasi menjadi salah satu hal yang penting dalam menunjang keberhasilan suatu program, dan hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mikkelsen (1999:64) bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

3. Partisipasi Warga / Masyarakat

Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek Partisipasi Warga belum berjalan maksimal, perlu dukungan dan partisipasi warga dalam mengawal bersama perangkat desa dalam perencanaan program pembangunan di Desa Tomoli Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini bertentangan dengan

pernyataan Kartasasmita (1996:145), bahwa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pematangan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dengan menggunakan tiga indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Tomoli selatan Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi Moutong melalui hasil observasi dan hasil wawancara langsung dengan informan perangkat Desa Tomoli Selatan dan warga masyarakatnya, dari ketiga dimensi/aspek Partisipasi Politik, Partisipasi Sosial dan Partisipasi Warga. Penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi politik sudah berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah Desa Tomoli Selatan dan warga masyarakat di Desa Tomoli selatan Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi Moutong pada umumnya, sedangkan indikator/dimensi partisipasi Sosial dan partisipasi warga yang hasilnya masih tidak terlaksana dengan baik. Faktor utama adalah sumber daya manusia (warga desa), dimana sebagian warga desa belum semuanya ikut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi program perencanaan pembangunan desa dan sebagian warga desa tidak peduli dengan apa yang telah pemerintah desa Tomoli selatan Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi moutong laksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, D. (1994). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta
- Mikkelsen, B. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Purba, et.al. (2021), Analisis Laporan Keuangan, Edisi. Kedua, Penerbit MitraWacana Media, Jakarta.
- Slamet, M. (2003). Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A. (2001). Teori dan Isi Pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa